



**RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2018**



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2018 dapat terselesaikan.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2018 ini memuat rencana program dan kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung yang rencananya akan dilaksanakan tahun 2018 penentuan target dan sasaran yang akan di capai pada tahun 2018 yang didasarkan pada sasaran dan indikator yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Periode 2015 – 2019. Penyusunan RENJA Tahun 2018 Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung ini di susun sebagai pedoman, arah dan tujuan penyelenggaraan pembangunan di bidang Koperasi dan UKM. Kami menyadari dokumen ini masih belum sempurna, masukan dan koreksi sangat diharapkan guna perbaikan-perbaikan diwaktu yang akan datang.

Demikian RENJA Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung tahun 2018 ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Bandar Lampung, April 2017

KEPALA DINAS,

SATRIA ALAM, S.E., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19610307 198603 1 007

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Tahun 2016	5
2.2 Perbandingan Realisasi RENJA Tahun 2016 Terhadap RENSTRA .	17
2.3 Hasil Capaian Sasaran Strategis	19
III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018	25
3.1 Telaahaan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	25
3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA SKPD	26
3.3 Program dan Kegiatan.....	28
3.4 Isu-Isu Stategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	33
IV. PENUTUP.....	35
LAMPIRAN	

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang merupakan program pembangunan 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang merupakan program pembangunan 5 (lima) tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai pedoman pembangunan tahunan.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Lampung ini merupakan dokumen komprehensif berwawasan 1 (satu) tahun. Penyusunan RENJA ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2015-2019 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung serta perwujudan program dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 yang berkedudukan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah Provinsi Lampung untuk lima tahun ke depan.

Penyusunan RENJA ini memuat program, kegiatan, tujuan, sasaran dan target yang ingin dicapai oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung dalam penyelenggaraan pembangunan daerah di tahun 2018 yang diselaraskan dengan tema pembangunan nasional 2018 dan prioritas pembangunan nasional 2018 serta tema pembangunan dan Provinsi Lampung 2018 dan prioritas pembangunan Provinsi Lampung 2018 dimana Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung masuk pada prioritas Provinsi Lampung 2018 ke 6 yaitu Bidang Industri, Koperasi dan UMKM.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2018 disusun berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
2. Undang-Undang No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
4. Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
5. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025.
6. Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
7. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah
8. Peraturan Pemerintah No. 06 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Pemerintah No. 07 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
10. Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
11. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Pembangunan Daerah.

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.
15. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 239 Tahun 2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Lampung Tahun 2005-2025.
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009 Sampai Dengan 2029.
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 13 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung.
19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019.
20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2018 ini adalah sebagai berikut :

1.3.1 Maksud

Penyusunan RENJA Tahun 2018 ini disusun dengan maksud untuk memberikan arah perencanaan, kebijakan dan program Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung tahun 2018.

1.3.2 Maksud

Tujuan Penyusunan RENJA Tahun 2018 ini adalah untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan di tahun 2018 yang sejalan dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan program Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah

sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2015-2019 Pemerintah Provinsi Lampung.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RENJA Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1.4.1 BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan RENJA Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung.

1.4.2 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2016

Bab ini memuat informasi tentang Evaluasi pelaksanaan RENJA Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2016 dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

1.4.3 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRA DAN KEGIATAN

Bab ini memuat analisis kebijakan nasional dan provinsi, sasaran dan tujuan serta rencana program dan kegiatan tahun 2018.

1.4.4 BAB IV PENUTUP

Bab ini memuat kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan Renja Dinas Koperasi dan UKM, dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan serta catatan dan harapan kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung.

II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Tahun 2016

Dibawah ini adalah tabel persentase rata-rata capaian kinerja per program tahun 2016. Persentase rata-rata capaian kinerja ini dihitung dengan membandingkan target kinerja fisik dan keuangan kegiatan tahun 2016 dengan realisasi kinerja fisik dan keuangan kegiatan di tahun 2016 dikali 100 persen. Berikut adalah tabel rata-rata pencapaian kinerja program di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016.

Tabel 2.1. Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program RENJA Tahun 2016

NO	PROGRAM	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)		PREDIKAT KERJA	
		FISIK	KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN
1	Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100	87,82	Sangat Tinggi	Tinggi
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	99,90	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100	99,40	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
4	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100	97,47	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
5	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan	100	98,82	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
6	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	100	98,23	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
7	Program Peningkatan Pelayanan BLUD UPTD Perkuatan Modal KUMKM	100	61,92	Sangat Tinggi	Sedang
8	Program Peningkatan Kualitas SDM koperasi dan UMKM	100	98,27	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
9	Program Peningkatan dan Pengembangan Kelembagaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	100	99,81	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
	RATA-RATA JUMLAH	100	91,86	Sangat Tinggi	Tinggi

Dari 9 Program yang ada di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, capaian rata-rata realisasi anggaran terendah ada pada Program Peningkatan Pelayanan BLUD UPTD Perkuatan Modal KUMKM yaitu sebesar 61,92 persen dari total anggaran pada program ini sebesar Rp. 737.000.000,-. Sedangkan realisasi keuangan tertinggi terdapat pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang mencapai 99,90 persen. Adapun realisasi capaian kinerja kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2. Capaian Kinerja dan Anggaran Program RENJA Tahun 2016

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Yang Dievaluasi (2016)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2016)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2016 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2		3		4		5	
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				5.210.936.634		4.899.055.452		
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH				5.210.936.634		4.899.055.452		
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Meningkatnya jumlah KUMKM yang terfasilitasi peningkatan sistem pendukung usahanya	KUMKM	50	717.847.000	50	705.137.800	100	98,23
1	Penilaian kesehatan bagi KSP/USP dan KJKS/UJKS	kop	50	98.900.000	50	98.785.000	100	99,88
2	Peningkatan dan perluasan akses permodalan bagi KUMKM	KUMKM	50	49.500.000	50	49.227.000	100	99,45
3	Temu konsultasi pemberdayaan usaha KUMKM	kali	1	44.190.000	1	44.190.000	100	100,00
4	Monitoring dan evaluasi program TPKU pada Pondok Pesantren dan SMK/SMU	kali	15	80.000.000	15	79.930.000	100	99,91
5	Pengawasan pelaksanaan USP bagi KASP/USP, KJKS/UJKS dan Kopdit	kop	50	42.257.000	50	42.257.000	100	100,00
6	Monev penilaian dan pengawasan kegiatan usaha bagi KSP/USP, KJKS/UJKS	kop	50	20.000.000	50	19.203.000	100	96,02
7	Pengembangan dan promosi produk-produk unggulan daerah	keg	2	348.000.000	2	336.595.800	100	96,72
8	Pembinaan UKM di UKM Center	KUMKM	50	35.000.000	50	34.950.000	100	99,86

Program Peningkatan Pelayanan BLUD UPTD Perkuatan Permodalan KUMKM		Meningkatnya jumlah KUMKM yang mendapat fasilitas akses permodalan BLUD	KUMKM	140	737.000.000	140	456.385.000	100	61,92
1	Peningkatan Pelayanan PPK-BLUD	jumlah pembiayaan peningkatan pelayanan PPK-BLUD	tahun	1	600.000.000	1	327.705.000	100	54,62
2	Monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana bergulir BLUD	jumlah KUMKM yang termonitor dan terevaluasi pemanfaatan dana bergulir BLUDnya	KUMKM	140	117.000.000	140	108.700.000	100	92,91
3	Sosialisasi penyaluran pinjaman BLUD KUMKM	jumlah peserta sosialisasi penyaluran pinjaman BLUD KUMKM	KUMKM	60	20.000.000	60	19.980.000	100	99,90
Program Peningkatan Kualitas SDM koperasi dan UMKM		Meningkatnya jumlah SDM Koperasi dan UMKM yang meningkat kapasitasnya	org	570	2.000.000.000	570	1.965.417.400	100	98,27
1	Pelatihan peningkatan kapasitas SDM koperasi dan umkm	jumlah peserta pelatihan peningkatan kapasitas SDM koperasi dan umkm	org	570	2.000.000.000	570	1.965.417.400		98,27
Program peningkatan dan pengembangan Kelembagaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah		Meningkatnya jumlah koperasi dan UMKM yang meningkat dan berkembang usahanya serta kelembagaannya	kum km	60	428.514.000	60	427.690.600	100	99,81
1	Kinerja Penilaian Koperasi Berprestasi dan Hari Koperasi Tingkat Provinsi	Jumlah kegiatan Penilaian Koperasi Berprestasi dan Hari Koperasi Tingkat Provinsi	even	1	109.789.500	1	109.461.900	100	99,70
2	Koordinasi kelembagaan Dan Up-dating data keragaan koperasi	jumlah koordinasi kelembagaan dan up-dating data keragaan koperasi	kali	15	158.286.500	15	158.103.700	100	99,88
3	Monitoring dan Evaluasi pengembangan SDM Koperasi dan UMKM	jumlah monitoring dan evaluasi pengembangan sdm koperasi dan umkm	kali	0	4.200.000	0	4.200.000	100	100,00
4	Bimtek manajemen usaha bagi pengelola Koperasi penerima Bansos	jumlah peserta bimtek manajemen usaha bagi pengelola koperasi penerima Bansos	org	60	85.838.000	60	85.838.000	100	100,00
5	Diklat perpajakan bagi koperasi	jumlah peserta diklat perpajakan bagi koperasi	org	30	65.000.000	30	64.687.000	100	99,52
6	Pelatihan manajemen sdm kumkm bagi pengelola koperasi simpan pinjam	Jumlah peserta pelatihan	kop	0	5.400.000	0	5.400.000	100	100,00
URUSAN PENDUKUNG					1.318.655.634		1.231.924.652		92,80
NON URUSAN					1.318.655.634		1.231.924.652		92,80
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Terwujudnya pelayanan perkantoran yang memenuhi tertib administrasi	bula n	12	713.536.332	12	626.622.478	100	87,82
1	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah pembiayaan penyediaan jasa surat menyurat	bula n	12	3.345.000	12	3.345.000	100	100,00
2	Penyediaan jasa komunikasi,	jumlah pembiayaan penyediaan rekening	bula n	12	194.708.600	12	148.394.478	100	76,21

	sumber daya air dan listrik	telepon, air dan listrik							
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	jumlah pembiayaan penyediaan jasa administrasi keuangan	bulan	12	235.200.000	12	235.200.000	100	100,00
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah pembiayaan penyediaan jasa kebersihan kantor	bulan	12	6.500.000	12	6.500.000	100	100,00
5	Penyediaan alat tulis kantor	jumlah pembiayaan penyediaan alat tulis kantor	bulan	12	15.500.000	12	15.500.000	100	100,00
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah pembiayaan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	bulan	12	8.000.000	12	7.740.200	100	96,75
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah pembiayaan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	bulan	12	7.000.000	12	7.000.000	100	100,00
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jenis	3	7.000.000	3	6.959.000	100	99,41
10	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah pembiayaan penyediaan makanan dan minuman	bulan	12	6.000.000	12	6.000.000	100	100,00
11	Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	kali	10	123.782.732	10	123.649.800	100	99,89
12	Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah	jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	kali	18	66.500.000	18	66.334.000	100	99,75
13	Pameran dan Promosi Pembangunan	jumlah pameran dan promosi pembangunan	event	1	40.000.000	-	-	-	-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	bulan	12	170.754.800	12	170.586.724	100	99,90
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	paket	1	128.000.000	1	127.915.000	100	99,93
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah pembiayaan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	bulan	12	42.754.800	12	42.671.724	100	99,81
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Terwujudnya pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	bulan	12	48.420.000	12	48.128.316	100	99,40
1	Pendidikan dan pelatihan formal	jumlah pembiayaan Pendidikan dan pelatihan formal	bulan	12	8.920.000	12	8.920.000	100	100,00
2	Pengelolaan SDM Umum, Kepegawaian dan Diklat Pegawai	jumlah pengelolaan SDM umum, kepegawaian dan diklat pegawai	kali	1	20.000.000	1	20.000.000	100	100,00
3	Kerjasama Anggota MPU	jumlah rapat kerjasama anggota MPU	kali	1	19.500.000	1	19.208.316	100	98,50
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Terwujudnya pelaksanaan peningkatan sistem capaian kinerja dan akuntabilitas keuangan	bulan	12	266.762.868	12	260.000.500	100	97,47
1	Penyusunan	jumlah laporan	dok	13	23.000.000	13	22.483.000	100	97,75

	laporan Keuangan	keuangan							
2	Penyusunan Laporan Bulanan	jumlah pembiayaan penyusunan laporan bulanan	bula n	12	7.500.000	12	6.642.000	100	88,56
3	Penyusunan data kepegawaian	jumlah data kepegawaian yang disusun	jenis	4	11.206.000	4	11.206.000	100	100,00
4	Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan	jumlah pembiayaan peningkatan akuntabilitas laporan keuangan	bula n	12	99.000.000	12	98.999.500	100	100,00
5	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	jumlah dokumen laporan capaian kinerja	dok	10	77.000.000	10	71.770.000	100	93,21
6	Peningkatan Data dan Informasi	jumlah pembiayaan peningkatan data dan informasi	bula n	12	49.056.868	12	48.900.000	100	99,68
Program perencanaan pembangunan daerah Tahunan			kali	1	128.101.634	1	126.586.634	100	98,82
1	Penyelenggaraan Musrenbang SKPD	jumlah penyelenggaraan musrenbang skpd	kali	1	128.101.634	1	126.586.634	100	98,82
TOTAL					5.210.936.634		4,786,555,452	100	91,86

Dari tabel diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada tahun 2016 penyerapan anggaran ataupun realisasi kinerja dan anggaran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung sudah sangat tinggi. Hal ini terlihat dari total rata-rata realisasi kinerja program dan kegiatan pada tahun anggaran 2016 sudah seluruhnya mencapai 100 persen. Pada Program administrasi perkantoran kegiatan penyelenggaraan pameran dan promosi pembangunan masih teranggarkan pada APBD-P tahun 2016, namun kemudian kegiatan pameran dan promosi pembangunan yang biasanya di sebut Lampung Fair tersebut tidak jadi diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung. Dengan demikian anggaran kegiatan tersebut tidak dipergunakan dan telah dikembalikan ke Kas Daerah.

Sedangkan untuk realisasi keuangan tahun anggaran 2016 sebesar 91,86 persen dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 5.210.936.634,-. Hal ini berarti hanya 8,14 persen dari total anggaran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2015 atau sebesar Rp. 424,381,182,- yang tidak terserap. Serapan anggaran terendah yaitu pada kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik hanya sebesar 76,21 persen. Hal ini dikarenakan penggunaan air listrik dan telepon yang memang tidak terlalu

besar. Selain itu, kegiatan Peningkatan Pelayanan PPK-BLUD juga serapan anggaran cukup rendah (54.62%). Jumlah anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 272.292.000,-. Sisa anggaran ini merupakan PAD Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung yaitu sebesar Rp. 112.500.000,- yang harus di setor ke Kasda sebagai PAD (25 persen dari anggaran RBA BLUD Perkuatan Permodalan KUMKM). Sehingga secara riil sisa Rp.. 159.792.000,- dari RBA BLUD yang tidak terserap. Anggaran ini tidak terserap dikarenakan:

1. Pelaksanaan kegiatan RBA dimulai pada bulan Mei yang seharusnya dimulai pada bulan Januari.
2. Tingkat kesadaran UKM untuk mengembalikan dana pinjaman sangat kurang
3. Tingkat Ekonomi secara makro menurun (harga rendah)
4. Tingkat intensitas pembinaan, pengawasan serta penagihan sangat kurang.
5. Dukungan dana APBD dalam pelaksanaan program kegiatan BLUD belum sesuai kebutuhan.

Secara rinci masing-masing realisasi kegiatan yaitu:

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan 12 kegiatan yaitu :
 1. Penyediaan jasa surat menyurat, dengan biaya Rp. 3.345.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah pembiayaan penyediaan jasa surat menyurat dengan target 12 bulan. Terealisasi Rp. 3.345.000,- dan telah terlaksana 100 %.
 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dengan biaya Rp. 194.708.600,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah pembiayaan rekening telepon, air dan listrik dengan target 12 bulan. Terealisasi Rp. 148.394.478,- dan telah terlaksana 100 %.
 3. Penyediaan jasa administrasi keuangan, dengan biaya Rp. 235.200.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah pembiayaan penyediaan jasa administrasi keuangan dengan target 12 bulan. Terealisasi Rp. 235.200.000,- dan telah terlaksana 100 %.
 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor, dengan biaya Rp. 6.500.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah pembiayaan jasa kebersihan

- kantordengan target 12 bulan. Terealisasi Rp. 6.500.000,- dan telah terlaksana 100 %.
5. Penyediaan alat tulis kantor, dengan biaya Rp. 15.500.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah pembiayaan alat tulis kantordengan target 12 bulan. Terealisasi Rp. 15.500.000,- dan telah terlaksana 100 %.
 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, dengan biaya Rp. 8.000.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah pembiayaan barang cetakan dan penggandaan dengan target 12 bulan. Terealisasi Rp. 7.740.200,- dan telah terlaksana 100 %.
 7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor, dengan biaya Rp. 7.000.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah pembiayaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan dengan target 12 bulan. Terealisasi Rp. 7.000.000,- dan telah terlaksana 100 %.
 8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-Undangan, dengan biaya Rp. 7.000.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan target 3 jenis. Terealisasi Rp. 6.959.000,- dan telah terlaksana 100 %.
 9. Penyediaan makanan dan minuman, dengan biaya Rp. 6.000.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat dengan target 12 bulan. Terealisasi Rp. 6.000.000,- dan telah terlaksana 100 %.
 10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, dengan biaya Rp. 123.782.732,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah koordiansi dan konsultasi ke luar daerah dengan target 10 kali. Terealisasi Rp. 123.649,800,- dan telah terlaksana 100 %.
 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah, dengan biaya Rp. 66.500.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dengan target 18 kali. Terealisasi Rp. 66.334.000,- dan telah terlaksana 100 %.
 12. Pameran dan promosi pembangunan, dengan biaya Rp. 40.000.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah pameran dan promosi yang di ikuti dengan target 1 even. Terealisasi Rp. 0,- dan tidak dilaksanakan. Hal ini

terjadi dikarenakan agenda pameran dan promosi pembangunan yang biasanya di sebut Lampung Fair tidak jadi diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan 3 kegiatan yaitu:

1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor, dengan biaya Rp. 128.000.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantordengan target 1 paket.Terealisasi Rp. 127.915.000,- dan telah terlaksana 100 %.
2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, dengan biaya Rp. 42.754.800,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah pembiayaan pemeliharaan kendaraan dinas/operasionaldengan target 12 bulan. Terealisasi Rp. 42.671.724,- dan telah terlaksana 100 %.

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan 3 kegiatan yaitu :

1. Pendidikan dan pelatihan formal, dengan biaya Rp. 8.920.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah pembiayaan pendidikan dan pelatihan formal dengan target 12 bulan. Terealisasi Rp. 8.920.000,- dan telah terlaksana 100 %.
2. Pengelolaan SDM Umum, Kepegawaian dan Diklat Pegawai, dengan biaya Rp. 20.000.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah kegiatan pengelolaan SDM umum, kepegawaian dan diklat pegawai dengan target 2 kali. Terealisasi Rp. 20.000.000,- dan telah terlaksana 100 %.
3. Kerja Sama Anggota MPU dengan biaya Rp. 19.500.000,- Indikator kinerjanya adalah jumlah rapat kerja sama anggota MPU dengan target 1 kali rapat. Terealisasi Rp. 19.208.316,- dan telah terlaksana 100 %.

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan 6 kegiatan yaitu :

1. Penyusunan laporan Keuangan, dengan biaya Rp. 23.000.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah laporan keuangan dengan target 13 dokumen. Terealisasi Rp. 19.208.316,- dan telah terlaksana 100 %.
 2. Penyusunan Laporan Bulanan, dengan biaya Rp. 7.500.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah penyusunan laporan bulanan dengan target 12 bulan. Terealisasi Rp. 6.642.000,- dan telah terlaksana 100 %.
 3. Penyusunan data kepegawaian, dengan biaya Rp. 11.206.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah penyusunan data kepegawaian target 4 kali. Terealisasi Rp. 11.206.000,- dan telah terlaksana 100 %.
 4. Peningkatan akuntabilitas laporan keuangan, dengan biaya Rp. 99.000.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah peningkatan akuntabilitas laporan keuangan dengan target 12 bulan. Terealisasi Rp. 98.999.500,- dan telah terlaksana 100 %.
 5. Penyusunan laporan capaian kinerja, dengan biaya Rp. 85.000.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah dokumen laporan capaian kinerja dengan target 10 dokumen. Terealisasi Rp. 71.770.000,- dan telah terlaksana 100 %.
 6. Peningkatan data dan informasi, dengan biaya Rp. 49.056.868,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah penyusunan data dan informasi dengan target 12 bulan. Terealisasi Rp. 48.900.000,- dan telah terlaksana 100 %.
- 5) Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan dengan 1 kegiatan yaitu :
1. Penyelenggaraan musrenbang SKPD dengan biaya Rp. 128.101.634,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah pelaksanaan musrenbang dengan target 1 kali. Terealisasi Rp. 126.586.634,- dan telah terlaksana 100%.
- 6) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi dan UMKM dengan 8 kegiatan yaitu :
1. Penilaian kesehatan bagi KSP/USP dan KJKS/UJKS dengan biaya Rp. 98.900.000,-. Indikatornya adalah jumlah penilaian terhadap

- koperasi di Kabupaten/Kota dengan target 50 koperasi. Terealisasi Rp. 98.785.000,- dan telah terlaksana 100 %.
2. Peningkatan dan perluasan akses permodalan bagi KUMKM dengan biaya Rp. 49.500.000,-. Indikatornya adalah jumlah UKM yang memperoleh Peningkatan dan Perluasan Akses Permodalan bagi Koperasi dan UMKM dengan target 50KUMKM. Terealisasi Rp. 49.227.000,- dan telah terlaksana 100 %.
 3. Temu konsultasi pemberdayaan usaha KUMKM dengan biaya Rp. 44.190.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah Temu konsultasi pemberdayaan usaha Koperasi dan UMKM dengan target 1 kali. Terealisasi Rp. 44.190.000,- dan telah terlaksana 100 %.
 4. Monitoring dan evaluasi program TPKU pada Pondok Pesantren dan SMK/SMU dengan biaya Rp. 80.000.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah Monitoring dan evaluasi program TPKU pada Pondok Pesantren dan SMK/SMU dengan target 15 kali. Terealisasi Rp. 79.930.000,- dan telah terlaksana 100 %.
 5. Pengawasan pelaksanaan USP bagi KASP/USP, KJKS/UJKS dan Kopdit dengan biaya Rp. 42.257.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah Pengawasan pelaksanaan USP bagi KSP/USP, KJKS/UJKS dan Kopdit dengan target 50 koperasi. Terealisasi Rp. 42.257.000,- dan telah terlaksana 100 %.
 6. Monev penilaian dan pengawasan kegiatan usaha bagi KSP/USP, KJKS/UJKS dengan biaya Rp. 20.000.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah Monev penilaian dan pengawasan kegiatan usaha bagi KSp/USP, KJKS/UJKS dengan target 50 koperasi. Terealisasi Rp. 19.203.000,- dan telah terlaksana 100 %.
 7. Pengembangan dan promosi produk-produk unggulan daerah dengan biaya Rp. 348.000.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah Pengembangan dan promosi Produk-produk unggulan daerah adalah 2 kegiatan Terealisasi Rp. 336.595.800,- dan telah terlaksana 100 %.
 8. Pembinaan UKM di UKM Center dengan biaya Rp. 35.000.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah KUMKM yang dibina di UKM Center

dengan target 50 KUMKM. Terealisasi Rp. 34.950.000,- dan telah terlaksana 100 %.

7) Program Peningkatan Pelayanan BLUD UPTD Perkuatan Modal KUMKM dengan 3 kegiatan yaitu :

1. Peningkatan pelayanan PPK-BLUD, dengan biaya Rp. 600.000.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah waktu peningkatan kinerja layanan PPK-BLUD dengan target 1 tahun. Terealisasi Rp. 327.705.000,- dan telah terlaksana 100 %.
2. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana bergulir BLUD, dengan biaya Rp. 117.000.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah kumkm yang termonitoring dan terevaluasi pemanfaatan dana bergulir BLUD dengan target 140 kumkm. Terealisasi Rp. 108.700.000,- dan telah terlaksana 100 %.
3. Sosialisasi penyaluran pinjaman BLUD KUMKM, dengan biaya Rp. 23.000.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah peserta sosialisasi dengan target 60orang. Terealisasi Rp. 19.980.000,- dan telah terlaksana 100 %.

8) Program Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi dan UMKM dengan 1 kegiatan yaitu :

1. Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi dan UMKM dengan biaya Rp. 2.000.000.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah pelatihan peningkatan kapasitas SDM koperasi dan UMKM dengan target 570 orang. Terealisasi Rp. 1.965.417.400,- dan telah terlaksana 100 %. Pelatihan ini dilaksanakan di Kota Bandar Lampung, Kabupaten Tulang Bawang, Kota Metro, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Tanggamus. Untuk mendukung kegiatan tersebut, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung sebelumnya telah merekrut Tenaga Pendamping Koperasi dan UMKM sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang ditempatkan di 15 Kabupaten/Kota

9) Program Peningkatan dan Pengembangan Kelembagaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan 6 kegiatan yaitu :

1. Kinerja penilaian koperasi berprestasi dan hari koperasi tingkat provinsi, dengan Biaya Rp. 220.000.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah kegiatan penilaian koperasi berprestasi dan Harkop tingkat provinsi dengan target 1 even. Terealisasi Rp. 109.461.900,- dan telah terlaksana 100 %. Puncak peringatan Hari Koperasi di Lampung dilaksanakan di Kotabumi Kabupaten Lampung Utara yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung. Dalam rangka meningkatkan kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi, maka dilaksanakan penilaian atas kinerja koperasi di Provinsi Lampung, untuk kemudian diberikan Penghargaan sebagai Koperasi Berprestasi baik tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Nasional. Adapun penghargaan dan bantuan yang diberikan yaitu :
 - ❖ Penghargaan Koperasi berprestasi tingkat nasional, provinsi , Koperasi berprestasi Tk Kabupaten Lampung Utara
 - ❖ Bantuan pembiayaan dana bergulir dari UPTD Perkuatan Permodalan (5 UMKM)
 - ❖ Peluncuran Program KUR (Bnk BNI, Mandiri dan BRI)
 - ❖ Penyerahan Sertifikat Hak Cipta
 - ❖ Penyerahan Program Fasilitasi Akta Koperasi bagi Pengusaha Mikro Provinsi Lampung Tahun 2016.
2. Koordinasi kelembagaan dan updating data keragaan koperasi, dengan biaya Rp. 205.000.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah koordinasi kelembagaan dan updating data keragaan koperasi dengan target 15 kali. Terealisasi Rp. 158.103.700,- dan telah terlaksana 100 %. Kegiatan ini mengupdate data jumlah koperasi yang ada di seluruh Provinsi Lampung melalui *Online DataSistem*.
3. Monitoring dan evaluasi pengembangan SDM koperasi dan UMKM, dengan biaya Rp. 4.200.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah monitoring dan evaluasi dengan target 0 kali (rasionalisasi).

Kegiatan ini tidak dapat terlaksana meski terdapat anggaran Rp. 4.200.000,- di karenakan terkena pemangkasan anggaran.

4. Bimtek manajemen usaha bagi pengelola koperasi penerima bansos, dengan biaya Rp. 90.000.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah peserta bimtek dengan target 60orang. Terealisasi Rp. 85.838.000,- dan telah terlaksana 100 %.
5. Diklat perpajakan bagi koperasi dengan biaya Rp. 65.000.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah peserta diklat dengan target 30 orang. Terealisasi Rp. 64.687.000,- dan telah terlaksana 100 %.
6. Pelatihan manajemen SDM KUMKM bagi pengelola koperasi simpan pinjam dengan biaya Rp. 5.400.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah peserta pelatihan dengan target 0 orang (rasionalisasi). Kegiatan ini tidak dapat terlaksana meski terdapat anggaran Rp. 4.200.000,- di karenakan terkena pemangkasan anggaran.

2.2 Perbandingan Realisasi Renja Tahun 2016 Terhadap Renstra

Dari form hasil evaluasi yang terdapat pada lampiran, dapat diketahui bahwa sampai dengan tahun 2016 atau periode 2 perencanaan Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung periode 2015 – 2019 untuk kinerja keuangannya sudah terealisasi sebesar Rp. 10.815.356.686,- atau sebesar 10,96 persen dari total anggaran renstra sebesar Rp. 98.641.044.000,-. Sedangkan untuk realisasi fisiknya sudah sebesar 25,28 persen. Realisasi fisik ini masih tergolong kecil dan jauh dari harapan karena tahun 2016 ini adalah periode tahun ke 2 pelaksanaan Renstra 2015 – 2019. Hal ini dapat di pahami dikarenakan ada beberapa program dan kegiatan pada Renstra periode 2015 – 2019 yang belum mendapatkan porsi anggaran karena terbatasnya kemampuan fiskal pemerintah Provinsi Lampung.

Berikut adalah rekapitulasi kinerja Renja sampai dengan tahun 2016 terhadap Renstra periode 2015 – 2019. Rata-rata capaian kinerja ini dihitung dengan membandingkan realisasi kinerja fisik dan keuangan kegiatan tahun 2015

ditambah tahun 2016 dengan target kinerja fisik dan keuangan kegiatan sampai dengan tahun 2016 (2015 + 2016) pada Renstra dikali 100 persen.

Tabel 2.3. Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Renstra Sampai Dengan Tahun 2016

NO	PROGRAM	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)	
		FISIK	KEUANGAN
1	Pelayanan Adminsitirasi Perkantoran	40	26
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	40	18
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	40	19
4	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	40	26
5	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan	25	32
6	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	27	4
7	Program Peningkatan Pelayanan BLUD UPTD Perkuatan Modal KUMKM	32	19
8	Program Peningkatan Kualitas SDM koperasi dan UMKM	29	17
9	Program Peningkatan dan Pengembangan Kelembagaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	28	15
	RATA-RATA JUMLAH	25,3	11

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pencapaian sampai dengan tahun 2016 terhadap Renstra tertinggi terdapat pada program pelayanan administrasi perkantoran yang mencapai 40 persen untuk realisasi fisik dan 26 persen untuk realisasi keuangan Realisasi fisik ini masih tergolong kecil dan jauh dari harapan karena tahun 2016 ini adalah periode tahun ke 2 pelaksanaan Renstra 2015 – 2019. Hal ini dapat di pahami dikarenakan ada beberapa program dan kegiatan pada Renstra periode 2015 – 2019 yang belum mendapatkan porsi anggaran karena terbatasnya kemampuan fiskal Pemerintah Provinsi Lampung yang berimbas terhadap kemampuan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung untuk mencapai target yang telah di tentukan pada Renstra.

2.3 Hasil Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Capaian kinerja pada sasaran strategis Dinas Koperasi dan UKM Povinsi Lampung dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.4. Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis Tahun 2016

NO	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	SATU AN	TARGET PADA 2016	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Meningkatnya Peran Koperasi Dalam Perekonomian Lampung	1	Jumlah koperasi aktif	Unit	3.018	3.024	100,19
		2	Persentase Omset Koperasi terhadap PDRB Lampung	Persen	0,82	1,07	130,48
		3	Jumlah Tenaga Kerja Koperasi	Orang	7.322	7.346	100,32
		4	Jumlah volume usaha koperasi	Milyar	2.156	2.743	127,22
		5	Jumlah koperasi aktif yang melaporkan penyelenggaraan RAT	Unit	423	506	119,62
		6	Jumlah koperasi sehat	Unit	37	40	108,11
		7	Jumlah koperasi yang mempunyai izin simpan pinjam	unit	25	30	120,00
2	Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM	1	Jumlah UMKM yang di bina	UKM	170.525	173.591	101,79
		2	Jumlah KUMKM yang mendapat akses permodalan pada lembaga keuangan mikro	UKM	280	282	100,7
		3	Jumlah kredit yang disalurkan BLUD UPTD Perkuatan Permodalan KUMKM	Milyar Rupiah	6,25	8,62	137,92
		4	Jangkauan pemasaran produk UKM	Provin si	4	4	100,00
		5	Jangkauan pemasaran produk koperasi	Provin si	2	2	100,00
		6	Jumlah pelaku usaha yang bernilai tambah dari aspek sertifikasi, HAKI, Paten	UKM	6	8	133,33
		7	Jumlah pelaku UKM yang terlatih	UKM	952	1.070	112,4
		8	Jumlah pelaku Koperasi yang terlatih	Kop	955	1.050	109,94
		9	Jumlah pembina yang terlatih	Orang	0	0	0,00
		10	Pertumbuhan wirausaha baru	Orang	125	130	104,00
3	Meningkatnya Kinerja Dinas, Laporan Keuangan dan AKIP Yang Optimal	1	Persentase temuan pengelolaan anggaran yang di tindak lanjuti	Persen	100	100	100,00
		2	Nilai evaluasi AKIP	Predik at	B	B	100,00
		3	Indeks kepuasan masyarakat	Indeks	B	B	100,00

Melihat dari persentase capaian kinerja pada sasaran strategis Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung nampak cukup baik, hal ini terlihat dari indikator kinerja sasaran yang sudah banyak melebihi target.

Jumlah Koperasi per 31 Desember 2016 sebanyak 5.320 unit Koperasi. Secara kelembagaan mengalami peningkatan sebanyak 224 unit Koperasi dari jumlah koperasi per desember 2015 sebanyak 5.096 unit. Dari total koperasi yang ada sejumlah 5.320 unit Koperasi, terdiri dari 3.024 (56,84 %) Koperasi yang aktif dan 2.296 (43,15 %) Koperasi yang tidak aktif. Adapun jumlah anggota koperasi sampai dengan saat ini sebesar 1.007.668 orang anggota.

Dengan adanya jumlah koperasi real, merupakan koperasi yang berkualitas yang dimungkinkan tumbuh lebih mudah sekaligus mudah diawasi dan dibina, dengan anggota dan volume usahanya yang ditingkatkan. Pertimbangannya adalah untuk menciptakan system koperasi yang sehat demi tercapainya koperasi yang tangguh dan mandiri. Dari uraian diatas, capaian kinerja yang sudah lebih baik dibanding tahun 2016. Namun untuk mencapai target sasaran utama strategis pada Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung 2015-2019, masih dibutuhkan anggaran yang memadai terutama untuk merevitalisasi koperasi-koperasi yang tidak aktif agar menjadi koperasi yang aktif serta dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak.

Beberapa upaya Pemberdayaan dan Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM yang telah dilakukan selama Tahun 2016 antara lain :

a. Pembiayaan Koperasi dan UMKM, melalui upaya:

- 1) Dana bergulir BLUD; telah disalurkan ke 134 KUMKM sebesar Rp. 4,21 Milyar. Perkembangan realiasi dana bergulir BLUD sampai dengan tahun 2016 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.5. Realiasi Dana Bergulir BLUD s/d Tahun 2016

NO.	KAB/KOTA	REALISASI DANA BERGULIR					
		TOTAL S/D TH 2014		TOTAL TH 2015		TOTAL TAHUN 2016	
		JML KUMKM	REALISASI (Rp 000)	JML KUMKM	REALISASI (Rp 000)	JML KUMKM	REALISASI (Rp 000)
1	Bandar Lampung	370	7.707.500	37	875.000	24	645.000
2	Metro	98	2.119.000	4	140.000	10	370.000
3	Lamsel	220	4.570.000	24	620.000	23	710.000
4	Lampung Tengah	207	4.427.000	11	350.000	20	645.000
5	Lampung Utara	139	2.995.000	4	185.000	8	305.000
6	Lampung Barat	141	3.149.000	4	180.000	4	170.000
7	Tanggamus	42	1.025.000	1	15.000	1	20.000
8	Tulang Bawang	82	1.425.000	16	360.000	6	155.000
9	Lampung Timur	161	3.247.500	4	145.000	5	175.000
10	Pesawaran	87	1.754.000	2	65.000	4	110.000
11	Way Kanan	122	2.850.000	1	50.000	2	100.000
12	Pringsewu	167	3.765.000	14	360.000	9	320.000
13	Mesuji	56	849.500	21	410.000	7	225.000
14	T. Bawang Barat	85	1.657.500	3	100.000	7	160.000
15	Pesisir Barat	29	689.000	0	0	4	100.000
	JUMLAH	2.006	42.230.500	146	3.855.000	134	4.210.000

Sumber : UPTD BLUD Perkuatan Modal KUKM Provinsi Lampung

Realisasi Dana Bergulir BLUD sampai dengan Tahun 2014 sebesar Rp 42.230.000.000,- yang didistribusikan kepada 2.006 UMKM, pada tahun 2015 penyaluran sebesar Rp 3.855.000.000,- kepada 146 UMKM sedangkan penyaluran tahun 2016 meningkat 9,2 % sebesar Rp 4.210.000.000,-. Sampai dengan 31 Desember 2016 jumlah UMKM yang mendapatkan pinjaman dana bergulir BLUD sebanyak 2.286 UMKM bertambah sebanyak 280 UMKM atau 13,95% dari tahun 2014 yang berjumlah 2.006 UMKM. Total penyaluran Dana Bergulir BLUD sampai dengan Tahun 2016 sebesar Rp. 50.295.500.000,- yang didistribusikan kepada 2.286 UMKM atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 8.065.000.000,- atau 19 %. Kredit Usaha Rakyat; kredit yang sudah tersalurkan sebesar Rp. 855,5 T dengan jumlah debitur sebanyak 301.680 debitur.

- 1) Penandatanganan MOU dengan LPDBuntuk lebih meningkatkan penyaluran bantuan permodalan bagi KUMKM yang ada di Provinsi Lampung.
- 2) Pembentukan Perusahaan Penjamin Kredit Daerah (PPKD) yang sudah ada perda dan menunggu penyertaan modal dari Pemerintah Provinsi Lampung.

b. Pemberdayaan Koperasi dan UMKM melalui upaya:

- 1) Pengembangan Koperasi Pedagang Kaki Lima; yaitu PKL Batu akik di PKOR Way Halim melalui Koperasi Sutrawa.
- 2) Pembangunan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT-KUMKM) Provinsi Lampung
- 3) Pameran dan Promosi produk-produk unggulan KUMKM
- 4) Penilaian Koperasi Berprestasi dan Hari Koperasi Tingkat Provinsi.

Adapun penghargaan yang diberikan adalah :

- a) Penghargaan Koperasi berprestasi tingkat nasional, provinsi, Koperasi berprestasi Tk Kabupaten Lampung Utara
- b) Bantuan pembiayaan dana bergulir dari UPTD Perkuatan Permodalan (5 UMKM)
- c) Peluncuran Program KUR (Bnk BNI, Mandiri dan BRI)
- d) Penyerahan Sertifikat Hak Cipta
- e) Penyerahan Program Fasilitas Akta Koperasi bagi Pengusaha Mikro Provinsi Lampung Tahun 2016.
- f) Provinsi Lampung mendapatkan 3 Koperasi berprestasi ditingkat Nasional yaitu KPRI Handayani, Kopel Bulog Divre Lampung, KUD Usaha Bersama dan Koperasi Berprestasi Tingkat Provinsi adalah Kopdit Sejahtera, Kopdit Santa Clara, Kopdit Dwi Tunggal, KJKS BMT Mitra Sejahtera, KSPPS El-Mentari Darul Falah, KSPPS Bina Bersama, Koppas Saiyo sakato, Koperasi Wanita Wiraguna, Koperasi Muslimat Nahdiatul Ulama An-Nisa, KPRI Husada Sejahtera. Penghargaan Koperasi berprestasi Tingkat Nasional diserahkan pada waktu Hari Koperasi Tingkat Nasional di Jambi pada tanggal 21 Juli 2016 dan

Koperasi Berprestasi tingkat Provinsi diserahkan pada acara Hari Koperasi Tingkat Provinsi Lampung di Kotabumi kab. Lampung Utara tanggal 6 September 2016.

c. Peningkatan SDM Koperasi dan UMKM Melalui Diklat-Diklat dan Pelatihan Yang Berkesinambungan. Pelatihan itu antara lain :

- 1) Bimtek manajemen usaha bagi pengelola koperasi penerima bansos
- 2) Diklat perpajakan bagi koperasi
- 3) Pelatihan Vocasional Pembuatan Krupuk Ikan dan Nuged di Kab. Tulang Bawang
- 4) Pelatihan Pengembangan Kewirausahaan UMKM di Kota Metro
- 5) Pelatihan Manajemen Pembukuan Perkoperasian di Lampung Utara
- 6) Pelatihan Perkoperasian di Kab. Lampung Tengah
- 7) Pelatihan Kewirausahaan bagi UMKM Usaha Kopi Bubuk di Kab. Tanggamus
- 8) Pelatihan Manajemen dan Pengelolaan Usaha bagi Koperasi di Sektor Riil
- 9) Pelatihan bagi UMKM Pengelola Produk Unggulan Daerah Lampung
- 10) Pelatihan Bagi Pengelola Koperasi Baru
- 11) Pelatihan bagi Manajer/Kepala Cabang/Calon Kepala Cabang
- 12) Pelatihan Kompetensi Manajer Pengelolaan KSPPS/USPPS Koperasi sesuai Prinsip Syariah
- 13) Pelatihan Akutansi Syariah bagi KSPPS/USPPS Koperasi
- 14) Pelatihan Kewirausahaan bagi KUMKM
- 15) Pelatihan Strategi Pengembangan Usaha
- 16) Pelatihan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pelaksanaan RAT
- 17) Pelatihan Akutansi Komputer bagi Usaha Ritel
- 18) Pelatihan Kelayakan Usaha bagi KUMKM

d. Peningkatan Daya Saing UMKM melalui upaya;

Pemberian Sertifikat hak cipta produk pada UKM, yaitu:

- 1) UKM Batik Una dengan batik
- 2) UKM Elvira dengan batik
- 3) UKM Eks Tapis dengan tapis
- 4) UKM Tapis Helau dengan tapis
- 5) UKM Omansyah dengan tapis Bung Lumba Tanggamus
- 6) UKM Altina dengan Sulam Usus Tumbung Manuk

Jangkauan pemasaran produk UMKM ke 4 Provinsi yaitu:

- 1) Bali
- 2) Makasar
- 3) Lombok
- 4) Jakarta

III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Dalam pembangunan bidang ekonomi secara eksplisit UUD 1945 menekankan implementasi azas kekeluargaan (pasal 33 ayat 1) dan penyelenggaraan perekonomian nasional yang berdasar atas demokrasi ekonomi (pasal 33 ayat 4). Selaras dengan itu, kebijakan yang berpihak (*affirmative policy*) terhadap Koperasi dan UMKM, telah menjadi harapan yang berkembang luas di tengah tumbuhnya kesadaran dan perhatian masyarakat terhadap nasib ekonomi rakyat. Oleh karena itu, selain pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, aspek penting yang menjadi agenda besar dalam proses pembangunan ekonomi hari ini dan ke depan adalah kemandirian ekonomi nasional dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan.

Guna mewujudkan kesinambungan NAWA CITA, pemerintah telah merancang prioritas pembangunan yang akan dicapai pada tahun 2018 mendatang. Oleh karenanya, Provinsi Lampung bersama pemerintah kabupaten/kota memiliki tanggung jawab untuk mendukung suksesnya pencapaian prioritas nasional yaitu :

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Perumahan dan Pemukiman
4. Pengembangan dunia usaha dan pariwisata
5. Ketahanan energi
6. Ketahanan pangan
7. Penanggulangan kemiskinan
8. Infrastruktur konektivitas kemaritiman
9. Pembangunan wilayah
10. Politik, hukum pertahanan keamanan

Sejalan dengan prioritas nasional dan tema pembangunan nasional yaitu “Memacu Investasi dan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas”, maka pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan tema pembangunan tahun 2018 yaitu “Memantapkan Pembangunan Infrastruktur dan Mendorong Investasi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas”.

Selanjutnya untuk mendorong percepatan pembangunan, pada tahun 2018 Pemerintah Provinsi Lampung telah merancang 7 (tujuh) prioritas pembangunan dimana terkait dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, masuk dalam mengemban prioritas pembangunan ke 6 (enam) yaitu “ Industri, Koperasi dan UMKM “. Berikut ini adalah prioritas pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2018.

1. Infrastruktur dan konektivitas
2. Pendidikan dan pembinaan mental
3. Kesehatan
4. Pertanian dan kelautan
5. Iklim investasi dan pariwisata
6. Industri, koperasi dan UMKM
7. Kamtibmas dan reformasi birokrasi

3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA SKPD

Sesuai dengan RENSTRA Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung Periode 2015-2019, ada 4 (empat) Sasaran Utama Strategis Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung yang akan di lakukan pada tahun 2018 yaitu:

1. Jumlah Koperasi Aktif
2. Jumlah Volume Usaha Koperasi
3. Jumlah KUKM yang mendapat akses permodalan pada lembaga keuangan mikro
4. Pertumbuhan wirausaha baru

Indikator kinerja yang ingin dicapai dalam pembangunan Koperasi dan UMKM di Provinsi Lampung tahun 2018 adalah:

- 1) Meningkatkan Peran Koperasi Dalam Perekonomian Lampung
- 2) Meningkatkan Daya Saing Koperasi dan UKM
- 3) Meningkatkan Kinerja Dinas, Laporan Keuangan dan AKIP Yang Optimal

Selengkapnya indikator kinerja dan target sasaran sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1. Indikator Kinerja dan Target Sasaran Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target 2018	Satuan
1	2	3		4	5
1	Meningkatnya Peran Koperasi Dalam Perekonomian Lampung	1	Jumlah koperasi aktif	3.170	Unit
		2	Persentase Omset Koperasi terhadap PDRB Lampung	1,0	Persen
		3	Jumlah Tenaga Kerja Koperasi	7.525	Orang
		4	Jumlah volume usaha koperasi	2.515	Milyar
		5	Jumlah koperasi aktif yang melaporkan penyelenggaraan RAT	476	Unit
		6	Jumlah koperasi sehat	77	Unit
		7	Jumlah koperasi yang mempunyai izin usaha simpan pinjam	50	Unit
2	Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UKM	1	Jumlah UKM yang di bina	80	UKM
		2	Jumlah UKM yang mendapat akses permodalan pada lembaga keuangan mikro	550	UKM
		3	Jumlah kredit yang disalurkan BLUD UPTD Perkuatan Permodalan KMUKM	12,75	Milyar Rupiah
		4	Jangkauan pemasaran produk UKM	8	Provinsi
		5	Jangkauan pemasaran produk koperasi	4	Provinsi
		6	Jumlah pelaku usaha yang bernilai tambah dari aspek sertifikasi, HAKI, Paten	10	UKM
		7	Jumlah pelaku UKM yang terlatih	1873	UKM

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target 2018	Satuan
1	2	3		4	5
		8	Jumlah pelaku koperasi yang terlatih	1873	Koperasi
		9	Jumlah pembina yang terlatih	135	Orang
		10	Pertumbuhan wirausaha baru	150	UKM
3	Meningkatnya Kinerja Dinas, Laporan Keuangan dan AKIP Yang Optimal	1	Persentase temuan pengelolaan anggaran yang di tindak lanjuti	100	Persen
		2	Nilai evaluasi AKIP	BB	Predikat
		3	Indeks kepuasan masyarakat	B	Indeks

3.3 Program dan Kegiatan

Jumlah Usulan Program dan Kegiatan pada RENJA tahun 2018 Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung sebesar Rp. 12.865.000.000,- (dua belas milyar delapan ratus enam puluh lima juta rupiah) terdiri dari 13 (tiga belas) program dan 75 (tujuh puluh lima) kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administarsi Perkantoran Rp. 1.575.000.000,- terdiri dari 13 kegiatan yaitu:
 - 1) Penyediaan jasa surat menyurat Rp. 40.000.000,-
 - 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Rp. 300.000.000,-
 - 3) Penyediaan jasa administrasi keuangan Rp. 350.000.000,-
 - 4) Penyediaan jasa kebersihan kantor Rp. 130.000.000,-
 - 5) Penyediaan alat tulis kantor Rp. 60.000.000,-
 - 6) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Rp. 30.000.000,-
 - 7) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Rp. 20.000.000,-
 - 8) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Rp. 30.000.000,-
 - 9) Penyediaan makanan dan minuman Rp. 45.000.000,-
 - 10) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Rp. 185.000.000,-

- 11)Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Rp. 85.000.000,-
 - 12)Pameran dan promosi pembangunan Rp. 200.000.000,-
 - 13)Penatausahaan barang milik OPD Rp. 100.000.000,-
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 890.000.000,-
terdiri dari 5 kegiatan yaitu:
 - 1) Pengadaan kendaraan dinas/operasional Rp. 300.000.000,-
 - 2) Pengadaan perlengkapan gedung kantor Rp. 200.000.000,-
 - 3) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Rp. 150.000.000,-
 - 4) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rp. 160.000.000,-
 - 5) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Rp. 80.000.000,-
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp. 140.000.000,- terdiri dari 1 kegiatan yaitu :
 - 1) Pengadaaan pakaian dinas dan perlengkapannya Rp. 140.000.000,-
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp. 195.000.000,-
terdiri dari 2 kegiatan yaitu :
 - 1) Pengelolaan SDM umum, kepegawaian dan diklat pegawai Rp. 120.000.000,-
 - 2) Kerjasama Anggota MPU Rp. 75.000.000,-
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Rp. 460.000.000,- terdiri dari 6 kegiatan yaitu :
 - 1) Penyusunan laporan keuangan Rp. 45.000.000,-
 - 2) Penyusunan data kepegawaian Rp. 120.000.000,-
 - 3) Peningkatan akuntabilitas laporan keuangan Rp. 60.000.000,-
 - 4) Penyusunan laporan capaian kinerja Rp. 100.000.000,-
 - 5) Peningkatan data dan informasi Rp. 100.000.000,-
 - 6) Monev dan Sinkronisasi program Rp. 75.000.000,-

6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan Rp. 120.000.000,- terdiri dari 1 kegiatan yaitu :
 - 1) Penyelenggaraan musrembang SKPD Rp. 120.000.000,-

7. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi dan UMKM Rp. 3.405.000.000,- terdiri dari 18 kegiatan yaitu :
 - 1) Penilaian kesehatan bagi KSP/USP dan KJKS/UJKS Rp. 210.000.000,-
 - 2) Bimtek dan transplantasi bagi pengelola koperasi konvensional dan syariah Rp. 150.000.000,-
 - 3) Monitoring dan evaluasi koperasi penerima bantuan di 15 kab/kota Rp. 50.000.000,-
 - 4) Pendampingan pameran KUKM dalam dan luar negeri Rp. 700.000.000,-
 - 5) Pendataan dan pembinaan KUMKM Rp. 80.000.000,-
 - 6) Transplantasi untuk 10 KUMKM dalam provinsi dalam rangka pembinaan ke luar provinsi Rp. 200.000.000,-
 - 7) Pengembangan dan promosi produk-produk unggulan daerah Rp. 325.000.000,-
 - 8) Identifikasi dan fasilitasi penerbitan standarisasi mutu bagi UMKM Rp. 150.000.000,-
 - 9) Pembinaan UKM di UKM Center Rp. 200.000.000,-
 - 10) Pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Rp. 250.000.000,-
 - 11) Sosialisasi kebijakan bidang pengawasan dan pemeriksaan Rp. 50.000.000,-
 - 12) Pengawasan kepatuhan legalitas koperasi dan sanksi Rp. 125.000.000,-
 - 13) Pemeriksaan usaha dan laporan keuangan koperasi Rp. 175.000.000,-
 - 14) Peningkatan kapasitas layanan PLUT KUMKM Rp. 300.000.000,-
 - 15) Peningkatan dan perluasan akses permodalan bagi koperasi Rp. 155.000.000,-
 - 16) Peningkatan kemitraan antara koperasi dengan perusahaan pabrikan dan perkulakan Rp. 75.000.000,-
 - 17) Peningkatan akses pasar produk koperasi dalam dan luar negeri Rp. 150.000.000,-

- 18) Pembentukan dan pengembangan perusahaan penjamin kredit daerah
Rp. 60.000.000,-
8. Program Peningkatan Pelayanan BLUD UPTD Rp. 1.050.000.000,- terdiri dari 6 kegiatan yaitu :
- 1) Peningkatan pelayanan PPK BLUD Rp. 600.000.000,-
 - 2) Monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana bergulir BLUD Rp. 100.000.000,-
 - 3) Diklat perkuatan modal usaha bagi UMKM calon / Penerima dana bergulir BLUD Rp. 100.000.000,-
 - 4) Bimtek penyusunan Laporan keuangan bagi KUMKM penerima dana bergulir BLUD Rp. 100.000.000,-
 - 5) Sosialisasi penyaluran pinjaman BLUD KUMKM Rp. 100.000.000,-
 - 6) Sosialisasi inisiasi pembentukan BLUD Rp. 50.000.000,-
9. Program Pemberdayaan Usaha Koperasi dan UMKM Rp. 290.000.000,- terdiri dari 3 kegiatan yaitu :
- 1) Peningkatan permodalan bagi koperasi Rp. 90.000.000,-
 - 2) Peningkatan jenis usaha koperasi Rp. 120.000.000,-
 - 3) Pembinaan, pemberian advokasi dan perlindungan hukum kepada koperasi dan anggota koperasi Rp. 80.000.000,-
10. Program Pengembangan Kelembagaan Koperasi dan UMKM Rp. 100.000.000,- terdiri dari 1 kegiatan yaitu :
- 1) Diklat kewirausahaan bagi UMKM Rp. 100.000.000,-
11. Program Peningkatan Kualitas SDM koperasi dan UMKM Rp. 2.480.000.000,- terdiri dari 5 kegiatan yaitu :
- 1) Pelatihan peningkatan dan pengembangan kapasitas wirausaha pemula Rp. 180.000.000,-
 - 2) Pelatihan peningkatan kapasitas SDM koperasi dan UMKM Rp. 2.000.000.000,-

- 3) Bimtek akutansi koperasi bagi pengelola koperasi jasa keuangan
Rp. 70.000.000,-
- 4) Bimtek pemasaran produk koperasi (*off dan on line sistem*)
Rp. 140.000.000,-
- 5) Monitoring dan evaluasi pengembangan SDM koperasi Rp. 90.000.000,-

12. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi/Revitalisasi Kelembagaan Rp. 560.000.000,- terdiri dari 3 kegiatan yaitu :

- 1) Pelatihan peningkatan pemahaman perkoperasian bagi aparatur
Rp. 300.000.000,-
- 2) Peningkatan pemahaman terhadap aturan perkoperasian
Rp. 200.000.000,-
- 3) Rapat koordinasi penyusunan program dan evaluasi kebijakan teknis pembiayaan, pembinaan dan penilaian KSP/USP Rp. 60.000.000,-

13. Program Peningkatan dan Pengembangan Kelembagaan Koperasi dan UMKM Rp. 1.600.000.000,- yang terdiri dari 11 kegiatan yaitu :

- 1) Kinerja penilaian koperasi berprestasi dan hari koperasi tingkat provinsi Rp. 250.000.000,-
- 2) Koordinasi kelembagaan dan up-dating data keragaan koperasi
Rp. 175.000.000,-
- 3) Diklat pemasaran hasil usaha Rp. 100.000.000,-
- 4) Diklat manajemen keuangan bagi pengelola koperasi Rp. 100.000.000,-
- 5) Monitoring dan evaluasi pengembangan SDM koperasi dan UMKM
Rp. 100.000.000,-
- 6) Diklat manajemen usaha kecil bagi koperasi Rp. 100.000.000,-
- 7) Diklat penyusunan laporan pertanggungjawaban pengurus dan pelaksanaan RAT bagi koperasi Rp. 100.000.000,-
- 8) Diklat perpajakan bagi koperasi Rp. 100.000.000,-
- 9) Pembinaan dan pengawasan koperasi Rp. 225.000.000,-
- 10) Pembinaan dan monitoring terhadap koperasi Rp. 150.000.000,-

- 11) Peningkatan kualitas tatalaksana koperasi melalui perizinan koperasi simpan pinjam Rp. 200.000.000,-

3.4 Isu-Isu Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berbagai permasalahan terkait dengan pengelolaan koperasi dan UKM antara lain rendahnya kualitas SDM yang berkompeten sehingga berdampak pada kinerja manajemen, lemahnya penguasaan akses teknologi tepat guna maupun moderen, kualitas produk hasil UKM masih rendah, lemahnya akses dan penguasaan pasar, belum terbangunnya jejaring dalam pemasaran produk hasil UKM, masih lemahnya pengembangan pola kemitraan dan jejaring usaha maupun jasa, terbatasnya dukungan prasarana dan sarana usaha, lemahnya kemampuan berinovasi, dan kurangnya informasi serta daya saing yang rendah. Di samping itu iklim usaha belum kondusif bagi UKM. Berdasarkan uraian dan permasalahan-permasalahan pembangunan di atas, maka isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan Koperasi dan UKM Provinsi Lampung dapat disarikan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kinerja pelayanan kepada masyarakat dari aparatur Koperasi dan UKM.
2. Rendahnya daya saing produk UKM dalam menghadapi pasar domestik dan global.
3. Masih rendah kualitas kinerja kelembagaan Koperasi dan UKM.
4. Lemahnya akses bagi KUKM pada sumber daya produktif (pembiayaan dan penjaminan).
5. Lemahnya daya saing sumber daya manusia pada KUKM.
6. Kurang kondusifnya iklim usaha bagi Koperasi, dan UKM.
7. Belum optimalnya penyerapan lapangan kerja disektor Koperasi dan UKM.
8. Masih rendahnya inovasi dan keterampilan sdm (pelaku) dalam pengembangan UKM.
9. Rendahnya kapasitas lembaga pelayanan permodalan dalam menunjang kinerja UKM.
10. Masih banyaknya koperasi tidak aktif.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja untuk pelaksanaan Renja Tahun 2016 dan uraian pada halaman terdahulu maka dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung dalam merealisasikan pelaksanaan Renja tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai SKPD yang baru terbentuk Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung hingga saat ini masih mengalami keterbatasan baik sarana maupun prasarana kerja serta sumber daya manusia aparatur.
2. Dari hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja untuk pelaksanaan Renja Tahun 2016 capaian kinerja berjalan sesuai target yaitu 100 persen dengan penyerapan anggaran pada belanja langsung sebesar 91.86 persen. Sementara untuk kesesuaian program dan kegiatan antara Renja dengan Renstra masih terdapat ketidaksesuaian yang disebabkan karena plot anggaran yang dialokasikan tidak bisa mengakomodir semua kegiatan yang direncanakan.

IV. PENUTUP

Penyusunan RENJA Tahun 2018 Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung ini di susun sebagai pedoman, arah dan tujuan penyelenggaraan pembangunan di bidang Koperasi dan UKM. Keberhasilan pelaksanaan RENJA Tahun 2018 Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung di tentukan oleh dukungan dari seluruh pegawai dan pelaku usaha Koperasi dan UKM di Provinsi Lampung.

Dengan tersusunnya RENJA Tahun 2018 Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung maka sasaran pembangunan di bidang Koperasi dan UKM ditandai dengan target capaian kinerja dalam tahun 2018 telah tergambar dan tercatat dengan jelas sehingga keinginan yang harus dicapai dalam masa perencanaan dapat di ukur dan dinilai keberhasilannya.

Bandar Lampung, April 2017

KEPALA DINAS,

SATRIA ALAM, S.E., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19610307 198603 1 007

LAMPIRAN

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2018
PROVINSI LAMPUNG**

Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Kode	urusan bidang	prioritas daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu indikatif tahun 2018	Prakiraan maju tahun 2019	SKPD Penanggung jawab 01/02/2003		
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR Koperasi dan Usaha Kecil Menengah													
2	11	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah												
2	11	15	Penilaian kesehatan bagi KSP/USP dan KJKS/UJKS	INDUSTRI, KOPERASI DAN UMKM	Prov. Lampung			Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya	70 Koperasi	Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya	70 Koperasi	210.000.000,00	210.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
2	11	15	Bintek dan transplantasi bagi Pengelola Koperasi Pola Konvensional dan syariah	INDUSTRI, KOPERASI DAN UMKM	Prov. Lampung			Jumlah peserta bintek bagi pengelola koperasi	50 Orang	Jumlah peserta bintek bagi pengelola koperasi	50 Orang	150.000.000,00	150.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
2	11	15	Peningkatan dan perluasan akses permodalan bagi KUMKM	INDUSTRI, KOPERASI DAN UMKM	Prov. Lampung			Jumlah koperasi yang mendapatkan akses kredit ke Perbankan	50 Koperasi	Jumlah koperasi yang mendapatkan akses kredit ke Perbankan	50 Koperasi	75.000.000,00	75.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
2	11	15	Pendampingan pameran KUMK dalam negeri dan luar negeri	INDUSTRI, KOPERASI DAN UMKM	Prov. Lampung			Jumlah koperasi yang dikenal produk daerah Lampung	30 UKM	Jumlah koperasi yang dikenal produk daerah Lampung	30 UKM	700.000.000,00	700.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
2	11	15	Pendataan dan pembinaan KUMKM	INDUSTRI, KOPERASI DAN UMKM	Prov. Lampung			Jumlah Pendataan dan pembinaan UKM	30 UKM	Jumlah Pendataan dan pembinaan UKM	30 UKM	80.000.000,00	80.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
2	11	15	Transplantasi untuk 10 KUMKM dalam Provinsi dalam rangka pembinaan ke luar provinsi	INDUSTRI, KOPERASI DAN UMKM	Luar Daerah			Jumlah Transplantasi	10 UKM	Jumlah Transplantasi	10 UKM	200.000.000,00	200.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
2	11	15	Pengembangan dan promosi produk-produk unggulan daerah	INDUSTRI, KOPERASI DAN UMKM	Kab/Kota			Jumlah Pengembangan Jaringan Usaha bagi UMKM Provinsi Lampung	200 UKM	Jumlah Pengembangan Jaringan Usaha bagi UMKM Provinsi Lampung	200 UKM	325.000.000,00	325.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
2	11	15	Identifikasi dan fasilitasi penerbitan standarisasi mutu bagi UMKM	INDUSTRI, KOPERASI DAN UMKM	Prov. Lampung			Jumlah peserta Identifikasi dan fasilitasi penerbitan standarisasi mutu bagi UKM	30 UKM	Jumlah peserta Identifikasi dan fasilitasi penerbitan standarisasi mutu bagi UKM	30 UKM	150.000.000,00	150.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
2	11	15	Pembinaan UKM di UMK Center	INDUSTRI, KOPERASI DAN UMKM	Kab/Kota			Jumlah Pembinaan UKM	15 UKM	Jumlah Pembinaan UKM	15 UKM	200.000.000,00	200.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
2	11	15	Pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT)	INDUSTRI, KOPERASI DAN UMKM	Kab/Kota			Jumlah UMKM yang terfasilitasi oleh layanan usaha PLUT	120 KUMKM	Jumlah UMKM yang terfasilitasi oleh layanan usaha PLUT	120 KUMKM	250.000.000,00	250.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
2	11	15	Sosialisasi kebijakan bidang pengawasan dan pemeriksaan	INDUSTRI, KOPERASI DAN UMKM	Prov. Lampung			Jumlah aparat yang mengikuti sosialisasi	40 Orang	Jumlah aparat yang mengikuti sosialisasi	40 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
2	11	15	Pengawasan kepatuhan legalitas koperasi dan sanksi	INDUSTRI, KOPERASI DAN UMKM	Kab/Kota			Jumlah koperasi yang diperiksa	50 Koperasi	Jumlah koperasi yang diperiksa	50 Koperasi	125.000.000,00	125.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
2	11	15	Pemeriksaan usaha dan laporan keuangan koperasi	INDUSTRI, KOPERASI DAN UMKM	Kab/Kota			Jumlah koperasi yang dapat menyajikan laporan keuangan yang baik	30 Koperasi	Jumlah koperasi yang dapat menyajikan laporan keuangan yang baik	30 Koperasi	175.000.000,00	175.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
2	11	15	Peningkatan komitmen antara koperasi dengan perusahaan pabrik dan perkulakan	INDUSTRI, KOPERASI DAN UMKM	Prov. Lampung			Jumlah koperasi yang mendapat akses komitmen dengan perusahaan pabrik dan perkulakan	30 Koperasi	Jumlah koperasi yang mendapat akses komitmen dengan perusahaan pabrik dan perkulakan	30 Koperasi	75.000.000,00	75.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
2	11	15	Peningkatan kapasitas layanan PLUT KUMKM	INDUSTRI, KOPERASI DAN UMKM	Prov. Lampung			Jumlah KUMKM yang melaksanakan bintek dan pemuktahiran data	250 KUMKM	Jumlah KUMKM yang melaksanakan bintek dan pemuktahiran data	250 KUMKM	300.000.000,00	300.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
2	11	15	Peningkatan akses pasar produk koperasi dalam dan luar negeri	INDUSTRI, KOPERASI DAN UMKM	Luar Provinsi			Jumlah provinsi yang terjangkau pemasaran produk koperasi	10 Koperasi	Jumlah provinsi yang terjangkau pemasaran produk koperasi	10 Koperasi	150.000.000,00	150.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
2	11	15	Percepatan pengembangan jaminan kredit daerah	INDUSTRI, KOPERASI DAN UMKM	Kab/Kota			Jumlah pemanfaatan jaminan kredit daerah bagi Koperasi dan UMKM	15 Lokasi	Jumlah pemanfaatan jaminan kredit daerah bagi Koperasi dan UMKM	15 Lokasi	60.000.000,00	60.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
2	11	16	Program Peningkatan Pelayanan BLUD UPTD Perkuatan Permodalan KUMKM									1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	
2	11	16	Peningkatan Pelayanan PPK-BLUD	INDUSTRI, KOPERASI DAN UMKM	Kab/Kota			Jumlah Peningkatan Pelayanan PPK-BLUD	15 kab/kota	Jumlah Peningkatan Pelayanan PPK-BLUD	15 kab/kota	600.000.000,00	600.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
2	11	16	Monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana bergulir BLUD	INDUSTRI, KOPERASI DAN UMKM	Kab/Kota			Jumlah Monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana bergulir BLUD	15 kab/kota	Jumlah Monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana bergulir BLUD	15 kab/kota	100.000.000,00	100.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
2	11	16	Diklat perkuatan modal usaha bagi UMKM calon / Penerima dana bergulir BLUD	INDUSTRI, KOPERASI DAN UMKM	Kab/Kota			Jumlah Peserta Diklat perkuatan modal usaha bagi UMKM calon / Penerima dana bergulir BLUD	50 Orang	Jumlah Peserta Diklat perkuatan modal usaha bagi UMKM calon / Penerima dana bergulir BLUD	50 Orang	150.000.000,00	150.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
2	11	16	Bintek penyusunan Laporan keuangan bagi KUMKM penerima dana bergulir BLUD	INDUSTRI, KOPERASI DAN UMKM	Kab/Kota			Jumlah peserta Bintek penyusunan Laporan keuangan bagi KUMKM penerima dana bergulir BLUD	100 Orang	Jumlah peserta Bintek penyusunan Laporan keuangan bagi KUMKM penerima dana bergulir BLUD	100 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
2	11	16	Sosialisasi penyaluran pinjaman BLUD KUMKM	INDUSTRI, KOPERASI DAN UMKM	Kab/Kota			Jumlah peserta Sosialisasi penyaluran pinjaman BLUD KUMKM	100 Orang	Jumlah peserta Sosialisasi penyaluran pinjaman BLUD KUMKM	100 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
2	11	16	Sosialisasi inisiasi Pembentukan BLUD	INDUSTRI, KOPERASI DAN UMKM	Kab/Kota			Jumlah sosialisasi inisiasi pembentukan BLUD	1 Kali	Jumlah sosialisasi inisiasi pembentukan BLUD	1 Kali	50.000.000,00	50.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
2	11	17	Program Pemberdayaan Usaha Koperasi dan UMKM									355.000.000,00	355.000.000,00	
2	11	17	Peningkatan jenis usaha koperasi	INDUSTRI, KOPERASI DAN UMKM	Prov. Lampung			Jumlah koperasi yang jenis usahanya meningkat	25 Koperasi	Jumlah koperasi yang jenis usahanya meningkat	25 Koperasi	120.000.000,00	120.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
2	11	17	Pembinaan, pemberian advokasi dan perlindungan hukum kepada koperasi dan anggota koperasi	INDUSTRI, KOPERASI DAN UMKM	Prov. Lampung			Jumlah koperasi yang terfasilitasi dalam penyelesaian sengketa hukum	10 Koperasi	Jumlah koperasi yang terfasilitasi dalam penyelesaian sengketa hukum	10 Koperasi	80.000.000,00	80.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
2	11	17	Peningkatan dan perluasan akses permodalan bagi koperasi	INDUSTRI, KOPERASI DAN UMKM	Prov. Lampung			Jumlah koperasi yang mendapat akses kredit ke perbankan, lembaga non bank baik pusat maupun daerah	65 Koperasi	Jumlah koperasi yang mendapat akses kredit ke perbankan, lembaga non bank baik pusat maupun daerah	65 Koperasi	155.000.000,00	155.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
2	11	18	Program Pengembangan Kelembagaan Koperasi dan UMKM									260.000.000,00	260.000.000,00	
2	11	18	Diklat Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam Bagi Pembina Koperasi dan UMKM	INDUSTRI, KOPERASI DAN UMKM	Prov. Lampung			Jumlah Peserta Diklat Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam Bagi Pembina Koperasi dan UMKM	30 Orang	Jumlah Peserta Diklat Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam Bagi Pembina Koperasi dan UMKM	30 Orang	80.000.000,00	80.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
2	11	18	Diklat Perkoperasian bagi Pembina Koperasi dan UMKM	INDUSTRI, KOPERASI DAN UMKM	Prov. Lampung			Jumlah Peserta Diklat Perkoperasian bagi Pembina Koperasi dan UMKM	30 Orang	Jumlah Peserta Diklat Perkoperasian bagi Pembina Koperasi dan UMKM	30 Orang	80.000.000,00	80.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah

2	11	18	5	Diklat kewirausahaan bagi pengelola UMKM	INDUSTRI, KOPERASI DAN UMKM	Prov. Lampung		Jumlah peserta diklat kewirausahaan bagi UMKM	30 Orang	Jumlah peserta diklat kewirausahaan bagi UMKM	30 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
2	11	19	6	Program Peningkatan Kualitas SDM koperasi dan UMKM								2.480.000.000,00	2.480.000.000,00	
2	11	19	6	Pelatihan peningkatan dan pengembangan kapasitas wirasaha pemula	INDUSTRI, KOPERASI DAN UMKM	Prov. Lampung		Jumlah Peserta Pelatihan peningkatan dan pengembangan kapasitas wirasaha pemula	30 UKM	Jumlah Peserta Pelatihan peningkatan dan pengembangan kapasitas wirasaha pemula	30 UKM	180.000.000,00	180.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
2	11	19	12	Bimtek akuntansi koperasi bagi pengelola koperasi jasa keuangan	INDUSTRI, KOPERASI DAN UMKM	Prov. Lampung		jumlah SDM koperasi yang dibina untuk menguasai standar akuntansi koperasi	50 Orang	jumlah SDM koperasi yang dibina untuk menguasai standar akuntansi koperasi	50 Orang	70.000.000,00	70.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
2	11	19	16	Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi dan UMKM	INDUSTRI, KOPERASI DAN UMKM	Prov. Lampung		Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi dan UMKM	521 Orang	Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi dan UMKM	521 Orang	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
2	11	19	18	Bimtek pemasaran produk koperasi (off dan On line Sistem)	INDUSTRI, KOPERASI DAN UMKM	Prov. Lampung		jumlah SDM koperasi yang memahami tentang manajemen pemasaran dan standar akuntansi koperasi	100 Orang	jumlah SDM koperasi yang memahami tentang manajemen pemasaran dan standar akuntansi koperasi	100 Orang	140.000.000,00	140.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
2	11	19	19	Monitoring dan evaluasi pengembangan SDM Koperasi	INDUSTRI, KOPERASI DAN UMKM	Kab/Kota		jumlah anggota koperasi yang dievaluasi	4015 Orang	jumlah anggota koperasi yang dievaluasi	4015 Orang	90.000.000,00	90.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
2	11	20	20	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi/Revitalisasi Kelembagaan								500.000.000,00	500.000.000,00	
2	11	20	9	Pelatihan peningkatan pemahaman perkoperasian bagi aparatur	INDUSTRI, KOPERASI DAN UMKM	Prov. Lampung		Jumlah Peserta Pelatihan peningkatan pemahaman perkoperasian bagi aparatur	60 Orang	Jumlah Peserta Pelatihan peningkatan pemahaman perkoperasian bagi aparatur	60 Orang	300.000.000,00	300.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
2	11	20	11	Peningkatan pemahaman terhadap aturan perkoperasian	INDUSTRI, KOPERASI DAN UMKM	4 Kab/Kota		Jumlah peserta peningkatan pemahaman terhadap aturan perkoperasian	160 Orang	Jumlah peserta peningkatan pemahaman terhadap aturan perkoperasian	160 Orang	200.000.000,00	200.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
2	11	21	21	Program peningkatan dan pengembangan Kelembagaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah								1.690.000.000,00	1.690.000.000,00	
2	11	21	21	Kinerja Penilaian Koperasi Berprestasi dan Hari Koperasi Tingkat Provinsi	INDUSTRI, KOPERASI DAN UMKM	Kab/Kota		Jumlah Kinerja Penilaian Koperasi Berprestasi dan Hari Koperasi Tingkat Provinsi	10 Koperasi	Jumlah Kinerja Penilaian Koperasi Berprestasi dan Hari Koperasi Tingkat Provinsi	10 Koperasi	250.000.000,00	250.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
2	11	21	2	Koordinasi kelembagaan Dan Up-dating data keragaan koperasi	INDUSTRI, KOPERASI DAN UMKM	Kab/Kota		Jumlah Koordinasi kelembagaan Dan Up-dating data keragaan koperasi	15 Lokasi	Jumlah Koordinasi kelembagaan Dan Up-dating data keragaan koperasi	15 Lokasi	175.000.000,00	175.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
2	11	21	14	Monitoring dan Evaluasi pengembangan SDM Koperasi dan UMKM	INDUSTRI, KOPERASI DAN UMKM	Prov. Lampung		Jumlah Monitoring dan Evaluasi pengembangan SDM Koperasi dan UMKM	15 kab/kota	Jumlah Monitoring dan Evaluasi pengembangan SDM Koperasi dan UMKM	15 kab/kota	190.000.000,00	190.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
2	11	21	19	Diklat pemasaran hasil usaha	INDUSTRI, KOPERASI DAN UMKM	Prov. Lampung		Jumlah pengelola UMKM yang meningkatkan pemasaran hasil usahanya	30 Orang	Jumlah pengelola UMKM yang meningkatkan pemasaran hasil usahanya	30 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
2	11	21	22	Diklat manajemen keuangan bagi pengelola koperasi	INDUSTRI, KOPERASI DAN UMKM	Prov. Lampung		Jumlah peserta diklat manajemen keuangan bagi pengelola koperasi	30 Orang	Jumlah peserta diklat manajemen keuangan bagi pengelola koperasi	30 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
2	11	21	30	Diklat manajemen usaha kecil bagi anggota koperasi	INDUSTRI, KOPERASI DAN UMKM	Prov. Lampung		Jumlah peserta diklat manajemen usaha kecil bagi anggota koperasi	30 Orang	Jumlah peserta diklat manajemen usaha kecil bagi anggota koperasi	30 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
2	11	21	32	Diklat penyusunan laporan pertanggungjawaban pengurus dan pelaksanaan RAT bagi koperasi	INDUSTRI, KOPERASI DAN UMKM	Prov. Lampung		Jumlah peserta diklat penyusunan laporan pertanggungjawaban pengurus dan pelaksanaan RAT bagi koperasi	30 Orang	Jumlah peserta diklat penyusunan laporan pertanggungjawaban pengurus dan pelaksanaan RAT bagi koperasi	30 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
2	11	21	33	Diklat perpajakan bagi koperasi	INDUSTRI, KOPERASI DAN UMKM	Prov. Lampung		Jumlah peserta diklat perpajakan bagi koperasi	30 Orang	Jumlah peserta diklat perpajakan bagi koperasi	30 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
2	11	21	48	Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	INDUSTRI, KOPERASI DAN UMKM	Kab/Kota		Jumlah Koperasi yang dibina	75 Koperasi	Jumlah Koperasi yang dibina	75 Koperasi	225.000.000,00	225.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
2	11	21	50	Pembinaan dan evaluasi monitoring terhadap koperasi	INDUSTRI, KOPERASI DAN UMKM	Prov. Lampung		jumlah pembinaan dan evaluasi monitoring terhadap koperasi	60 Koperasi	jumlah pembinaan dan evaluasi monitoring terhadap koperasi	60 Koperasi	150.000.000,00	150.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
2	11	21	51	Peningkatan kualitas tata laksana koperasi melalui perizinan koperasi simpan pinjam	INDUSTRI, KOPERASI DAN UMKM	Prov. Lampung		jumlah peningkatan kualitas tata laksana koperasi melalui perizinan koperasi simpan pinjam	110 Koperasi	jumlah peningkatan kualitas tata laksana koperasi melalui perizinan koperasi simpan pinjam	110 Koperasi	200.000.000,00	200.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
5	4			URUSAN PENDUKUNG										
5	4			Non Urusan (Eks BAU)										
5	4	15		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								1.575.000.000,00	1.575.000.000,00	
5	4	15	1	Penyediaan jasa surat menyurat	INDUSTRI, KOPERASI DAN UMKM	Prov. Lampung		Jumlah pembiayaan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	Jumlah pembiayaan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	40.000.000,00	40.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
5	4	15	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	INDUSTRI, KOPERASI DAN UMKM	Prov. Lampung		jumlah pembiayaan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	jumlah pembiayaan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	300.000.000,00	300.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
5	4	15	7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	INDUSTRI, KOPERASI DAN UMKM	Prov. Lampung		jumlah pembiayaan penyediaan jasa administrasi keuangan	12 Bulan	jumlah pembiayaan penyediaan jasa administrasi keuangan	12 Bulan	350.000.000,00	350.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah

5	4	15	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	INDUSTRI, KOPERASI DAN UMKM	Prov. Lampung		Jumlah pembiayaan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	Jumlah pembiayaan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	130.000.000,00	130.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
5	4	15	10	Penyediaan alat tulis kantor	INDUSTRI, KOPERASI DAN UMKM	Prov. Lampung		Jumlah pembiayaan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	Jumlah pembiayaan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	60.000.000,00	60.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
5	4	15	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	INDUSTRI, KOPERASI DAN UMKM	Prov. Lampung		Jumlah pembiayaan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	Jumlah pembiayaan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	30.000.000,00	30.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
5	4	15	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	INDUSTRI, KOPERASI DAN UMKM	Prov. Lampung		Jumlah pembiayaan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	Jumlah pembiayaan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	20.000.000,00	20.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
5	4	15	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	INDUSTRI, KOPERASI DAN UMKM	Prov. Lampung		Jumlah pembiayaan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	Jumlah pembiayaan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	30.000.000,00	30.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
5	4	15	17	Penyediaan makanan dan minuman rapat	INDUSTRI, KOPERASI DAN UMKM	Prov. Lampung		Jumlah pembiayaan penyediaan makanan dan minuman rapat	12 Bulan	Jumlah pembiayaan penyediaan makanan dan minuman rapat	12 Bulan	45.000.000,00	45.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
5	4	15	18	Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	INDUSTRI, KOPERASI DAN UMKM	Luar Provinsi		Jumlah pembiayaan Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	Jumlah pembiayaan Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	185.000.000,00	185.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
5	4	15	22	Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah	INDUSTRI, KOPERASI DAN UMKM	Kab/Kota		Jumlah pembiayaan Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah	15 kab/kota	Jumlah pembiayaan Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah	15 kab/kota	85.000.000,00	85.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
5	4	15	29	Pameran dan Promosi Pembangunan	INDUSTRI, KOPERASI DAN UMKM	Prov. Lampung		Jumlah pameran Lampung Fair	1 Event	Jumlah pameran Lampung Fair	1 Event	200.000.000,00	200.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
5	4	15	69	Penatausahaan barang milik daerah	INDUSTRI, KOPERASI DAN UMKM	Prov. Lampung		Jumlah dokumen pengelolaan barang milik daerah	4 Dokumen	Jumlah dokumen pengelolaan barang milik daerah	4 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
5	4	16		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								1.190.000.000,00	1.190.000.000,00	
5	4	16	5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	INDUSTRI, KOPERASI DAN UMKM	Prov. Lampung		Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional	1 Unit	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional	1 Unit	300.000.000,00	300.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
5	4	16	7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	INDUSTRI, KOPERASI DAN UMKM	Prov. Lampung		Jumlah pembiayaan pengadaan perlengkapan gedung kantor	1 Paket	Jumlah pembiayaan pengadaan perlengkapan gedung kantor	1 Paket	200.000.000,00	200.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
5	4	16	9	Pengadaan peralatan gedung kantor	INDUSTRI, KOPERASI DAN UMKM	Prov. Lampung		Jumlah pembiayaan pengadaan peralatan gedung kantor	1 Paket	Jumlah pembiayaan pengadaan peralatan gedung kantor	1 Paket	300.000.000,00	300.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
5	4	16	18	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	INDUSTRI, KOPERASI DAN UMKM	Prov. Lampung		Jumlah pembiayaan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 Paket	Jumlah pembiayaan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 Paket	150.000.000,00	150.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
5	4	16	20	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	INDUSTRI, KOPERASI DAN UMKM	Prov. Lampung		Jumlah pembiayaan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	Jumlah pembiayaan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	160.000.000,00	160.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
5	4	16	24	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	INDUSTRI, KOPERASI DAN UMKM	Prov. Lampung		Jumlah pembiayaan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12 Bulan	Jumlah pembiayaan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12 Bulan	80.000.000,00	80.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
5	4	17		Program Peningkatan Disiplin Aparatur								140.000.000,00	140.000.000,00	
5	4	17	2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	INDUSTRI, KOPERASI DAN UMKM	Prov. Lampung		Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	1 Paket	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	1 Paket	140.000.000,00	140.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
5	4	19		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								320.000.000,00	320.000.000,00	
5	4	19	6	Koordinasi dan Sinkronisasi Program	INDUSTRI, KOPERASI DAN UMKM	Prov. Lampung		Jumlah Pembiayaan Koordinasi dan Sinkronisasi Program	12 Bulan	Jumlah Pembiayaan Koordinasi dan Sinkronisasi Program	12 Bulan	200.000.000,00	200.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
5	4	19	26	Pengelolaan SDM Umum, Kepegawaian dan Diklat Pegawai	INDUSTRI, KOPERASI DAN UMKM	Prov. Lampung		Jumlah Pembiayaan Pengelolaan SDM Umum, Kepegawaian dan Diklat Pegawai	12 Bulan	Jumlah Pembiayaan Pengelolaan SDM Umum, Kepegawaian dan Diklat Pegawai	12 Bulan	120.000.000,00	120.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
5	4	20		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								560.000.000,00	560.000.000,00	
5	4	20	1	Penyusunan laporan Keuangan	INDUSTRI, KOPERASI DAN UMKM	Prov. Lampung		Jumlah pembiayaan Penyusunan laporan Keuangan	12 Bulan	Jumlah pembiayaan Penyusunan laporan Keuangan	12 Bulan	45.000.000,00	45.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
5	4	20	3	Penyusunan Laporan Bulanan	INDUSTRI, KOPERASI DAN UMKM	Prov. Lampung		Jumlah pembiayaan Penyusunan data kepegawaian	12 Bulan	Jumlah pembiayaan Penyusunan data kepegawaian	12 Bulan	10.000.000,00	10.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
5	4	20	22	Penyusunan data kepegawaian	INDUSTRI, KOPERASI DAN UMKM	Prov. Lampung		Jumlah pembiayaan Penyusunan data kepegawaian	12 Bulan	Jumlah pembiayaan Penyusunan data kepegawaian	12 Bulan	120.000.000,00	120.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
5	4	20	35	Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan	INDUSTRI, KOPERASI DAN UMKM	Prov. Lampung		Jumlah Pembiayaan Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan	12 Bulan	Jumlah Pembiayaan Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan	12 Bulan	60.000.000,00	60.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
5	4	20	69	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	INDUSTRI, KOPERASI DAN UMKM	Prov. Lampung		Jumlah Pembiayaan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	11 Dokumen	Jumlah Pembiayaan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	11 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
5	4	20	77	Peningkatan Data dan Informasi	INDUSTRI, KOPERASI DAN UMKM	Prov. Lampung		Jumlah Pembiayaan Peningkatan Data dan Informasi	12 Bulan	Jumlah Pembiayaan Peningkatan Data dan Informasi	12 Bulan	100.000.000,00	100.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
5	4	20	96	Monev dan sinkronisasi program	INDUSTRI, KOPERASI DAN UMKM	Prov. Lampung		Jumlah pelaksanaan monev dan sinkronisasi program	15 Kali	Jumlah pelaksanaan monev dan sinkronisasi program	15 Kali	75.000.000,00	75.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
5	4	25		Program perencanaan pembangunan daerah tahunan								300.000.000,00	300.000.000,00	
5	4	25	25	Penyelenggaraan Musrenbang SKPD	INDUSTRI, KOPERASI DAN UMKM	Prov. Lampung		Jumlah Peserta Penyelenggaraan Musrenbang SKPD	50 Orang	Jumlah Peserta Penyelenggaraan Musrenbang SKPD	50 Orang	300.000.000,00	300.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
TOTAL												13.745.000.000,00	13.745.000.000,00	

BANDAR LAMPUNG,
KEPALA DINAS,

APRIL 2017

SATRIA ALAM, SE., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610307 198603 1 007

